

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut kedalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat serta halusinasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach (pendekatan Undang-undang), mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai insitusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. penegakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan ketentuan “Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” bahwa upaya yang telah dilakukan oleh SATRESKRIM POLRES Kabupaten Bangkalan dengan cara mengacu pada ketentuan “KUHP” dan “Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika”, yakni dengan menerima laporan atau informasi, penyidikan, penyitaan barang bukti, penahana, dan rehabilitasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat beberapa hambatan dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di wilayah POLRES Bangkalan. Adanya penyalahgunaan kewenangan pada aparat penegak hukum, yang menyebabkan adanya diskriminalisasi terhadap peristiwa tindak pidana berupa membawa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi dalam jumlah tertentu dalam kehidupan sehari hari disebut sebagai bentuk pelanggaran hukum. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamantkan kepada aparat penegak hukum di wilayah “Kabupaten Bangkalan”. Dalam menangani tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta adanya pengaturan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika, Insitusi Sosial, Rehabilitasi*

ABSTRACT

Narcotics are substances that can cause certain effects for those who use them by inserting the drugs into their bodies, these effects are refraction, loss of stimulation pain, enthusiasm and hallucinations. This study uses a statute approach, identifying and conceptualizing law as a real and functional social institution in real life systems. enforcement of narcotics offenders is based on the provisions of "Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics" that the efforts that have been made by the Bangkalan POLRES SATRESKRIM by referring to the provisions of "KUHAP" and "Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics", namely by receive reports or information, investigation, confiscation of evidence, custody, and rehabilitation. However, in the field implementation there are several obstacles in overcoming narcotics crime in the Bangkalan POLRES area. The existence of abuse of authority in law enforcement officers, which causes the existence of discrimination against criminal acts in the form of carrying, possessing, controlling and consuming certain amounts in daily life is a form of law violation. The implementation of the provisions stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has secured the law enforcement officers in the "Bangkalan Regency" area. In dealing with criminal acts of narcotics abuse as well as the provision of efforts to carry out rehabilitation of narcotics offenders.

Keywords: *Narcotics, Social Institutions, Rehabilitation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Jenis Penelitian	7
1.4.2 Metode Pendekatan	7
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	8
1.4.4 Metode Analisa Data	9
1.5 Keaslian	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 Penegakan Hukum	12
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum	12
2.1.2 Faktor Atau Komponen Penegakan Hukum Pidana	13
2.1.3 Teori Penegakan Hukum	18
2.2 Penyalahgunaan Narkotika	23
2.2.1 Pengertian Narkotika	23
2.2.2 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	30
2.2.3 Ciri-ciri Khusus Tindak Pidana Naarkotika	32
 BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI POLRES BANGKALAN	 34
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34

3.2 Upaya & Faktor Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Di Lakukan Di Polres Bangkalan	38
3.2.1 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Di Polres Bangkalan	38
3.2.2 Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Timbulnya Penyalahgunaan Narkotika Di Bangkalan	55
3.2.3 Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Bangkalan	57
3.3 Implementasi Aturan Dekriminalisasi Dan Rehabilitasi Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Bangkalan	61
3.3.1 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	64
BAB IV PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69